

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 7335/UN40/KP/2016 TANGGAL 14 OKTOBER 2016

**RENCANA STRATEGIS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
(RENSTRA PKM UPI)
TAHUN 2016-2020**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia (RENSTRA PkM UPI) 2016-2020 ini memuat rencana pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia mulai tahun 2016-2020. RENSTRA pengabdian kepada masyarakat ini merupakan ketentuan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi prioritas sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh Universitas dan oleh bangsa Indonesia, baik di tingkat lokal maupun global. Rencana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan juga akan diupayakan sejalan dengan peran dan rencana jangka panjang Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, RENSTRA pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat mendorong sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia untuk menjadi masyarakat akademik yang produktif dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, berperan serta dalam menyelesaikan berbagai masalah lokal maupun global, dan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia maupun dunia.

Dokumen RENSTRA Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan RPJP Universitas Pendidikan Indonesia, yang berupaya untuk menghadapi berbagai tantangan Universitas dan tantangan dunia yang ada, RENSTRA pengabdian kepada masyarakat ini juga ditujukan untuk dapat memberikan arahan kepada para sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia untuk menjawab tantangan yang ada melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.

RENSTRA pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia ini disusun untuk jangka waktu 2016 - 2020 dengan pertimbangan: (1) Kurun waktu tersebut merupakan ukuran yang sesuai dengan RENSTRA Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga jangka waktu ini dianggap realistis; (2) Tahun 2020 merupakan akhir dari renstra UPI 2016-2020, sehingga UPI dapat mengerahkan seluruh potensinya agar dapat mencapai kondisi yang ditargetkan; (3) Tahun 2020, sesuai dengan RPJP UPI, Universitas Pendidikan Indonesia

menargetkan diri menjadi salah satu universitas yang unggul dalam bidang pendidikan di tingkat ASEAN.

RESTR A pengabdian kepada masyarakat ini disusun berdasarkan hasil analisis, diskusi, *benchmarking* dari berbagai lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, universitas dan organisasi institusi baik di dalam maupun di luar negeri, melalui observasi terhadap berbagai dokumen terkait program pengabdian kepada masyarakat yang ada dewasa ini. Saran dan masukan untuk perbaikan RESTR A pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia ini ke depan sangat diharapkan.

Demikian RENSTR A pengabdian kepada masyarakat ini disiapkan untuk mendapat verifikasi dan pendalaman Pimpinan Universitas dan sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia.

Bandung, Oktober 2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian RENSTRA.....	5
C. Tujuan Penyusunan RENSTRA	6
D. Pendekatan Penyusunan RENSTRA	7
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN	8
A. Visi	8
B. Misi.....	8
C. Landasan Hukum	10
D. Analisis Situasi Saat Ini	11
1. Riwayat Perkembangan Kelembagaan	11
2. Potensi Sumber Daya Manusia.....	17
3. Manajemen Aset dan Fasilitas.....	18
4. Peran LPPM.....	19
5. Analisis SWOT	23
BAB III GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	29
A. Arah dan Kebijakan RENSTRA PkM.....	29
1. Arah dan Kebijakan PkM Tingkat Nasional	29
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	29
b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025	30
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	33
d. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	34

e. Agenda Riset Nasional 2016-2019.....	39
2. Arah dan Kebijakan PkM UPI	40
a. Arah dan Kebijakan PkM menurut Statuta UPI	40
b. Arah dan Kebijakan PkM menurut Peraturan MWA UPI.....	40
c. Arah dan kebijakan PkM menurut Renstra UPI.....	42
B. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat	43
C. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja.....	44
D. Payung dan Tema Pengabdian Kepada Masyarakat.....	45
1. Payung Pengabdian Kepada Masyarakat.....	45
2. Tema pengabdian kepada masyarakat	45
a. Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang Ilmu (PkM Bidang Ilmu)	45
b. Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Desa Binaan Berbasis Kemitraan (PkM Desa Binaan)	47
c. Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PkM Kewirausahaan).....	48
d. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian (PkM-BHP) ...	50
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	52
A. Program Pengabdian Kepada Masyarakat.....	52
B. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.....	52
C. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat	53
BAB V POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN DISEMINASI	61
A. Pola Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	61
B. Pola Pemantauan.....	62
1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi	65
2. Langkah-Langkah Monev.....	66
3. Evaluasi Akhir Program	67

BAB VI PENUTUP	69
A. Peluang Tindak Lanjut Program	69

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa hal terkait penyusunan RENSTRA PkM diantaranya yaitu latar belakang, pengertian RENSTRA, tujuan penyusunan RENSTRA, dan pendekatan penyusunan RENSTRA.

A. Latar Belakang

Berdasarkan *ASEAN Economic Blueprint*, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan anggota-anggota didalamnya. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP (*Gross Domestic Product*) Indonesia. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Fondasi industri yang lemah membuat Indonesia berada pada peringkat keempat di ASEAN (Republika Online, 2013). Dengan hadirnya MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri sebagai basis memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, para *professional* diharapkan dapat lebih peka terhadap

fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dengan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik antara otoritas negara dan para pelaku usaha diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan social (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia (Baskoro, 2013).

Tantangan yang begitu besar dalam menghadapi era MEA menuntut setiap kepala daerah memiliki kebijakan dan program pembangunan daerah yang baik. Program pembangunan daerah dapat direncanakan melalui RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di setiap provinsi. Di Propinsi Jawa Barat sendiri RPJPD diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sebagai persiapan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang. Bidang-bidang unggulan yang melatarbelakangi kebijakan umum RPJMD 2013-2018 merupakan upaya untuk mewujudkan visi Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia pada tahun 2025

Sementara itu, fokus pembangunan Jawa Barat pada tahun 2013-2018 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada adalah:

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat

sinergis, serasi dan berkelanjutan;

2. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya;
3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar perkotaan dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya.
4. Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.
5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan diantaranya wilayah Jabodetabekjur, wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah, dan wilayah perbatasan Jawa Barat – Banten (RPJMD Jabar, 2013-2018: VII 1-3)

Sebagai upaya memajukan daerah maka Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di lingkungannya untuk menyinergikan program-program perguruan tinggi dalam rangka pembangunan daerah. Salah satu program perguruan tinggi yang memiliki fokus dalam pembangunan daerah atau kewilayahan serta mewujudkan peningkatan SDM (sumber daya manusia) kearah kemandirian dan kesejahteraan masyarakat yaitu program PkM (Pengabdian kepada Masyarakat).

Pengabdian kepada masyarakat merupakan dharma ke tiga dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia. Dengan dilaksanakannya dharma

pengabdian kepada masyarakat di samping darma pendidikan dan penelitian, diharapkan selalu ada keterkaitan kemanunggalan antara perguruan tinggi dengan masyarakat, sehingga ada usaha untuk mencegah adanya isolasi perguruan tinggi dengan lingkungan masyarakat sekitar. Perguruan Tinggi merupakan salah satu sistem atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem masyarakat dan kebudayaan bangsa untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah kehidupan yang semakin berat dan rumit. Selain itu perguruan tinggi merupakan investasi masyarakat yang mempunyai nilai tambah dari hasil investasi tersebut bagi pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan harap hidup masyarakat.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu perguruan tinggi di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sivitas akademika di dalam mengembangkan dan meningkatkan pendidikan masyarakat. Berkenaan dengan itu melalui program pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan masyarakat yang pada akhirnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Program pengabdian kepada masyarakat tentunya selaras dengan Visi Kemenristekdikti yaitu “terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan IPTEK dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan IPTEK dan inovasi dimaknai sebagai keahlian sumber daya manusia dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan). Sementara itu, daya saing bangsa adalah kontribusi IPTEK dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil

litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi (Renstra Kemenristekdikti, 2015-2019: 21).

Program pengabdian kepada masyarakat dipandang oleh Universitas Pendidikan Indonesia sebagai program yang wajib dilaksanakan, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip: (1) kompetensi akademik; (2) kewirausahaan; dan (3) professional; sehingga dapat menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan, dan sinergis dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Ruyadi dkk, 2010:172). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu 2011-2014 mengalami peningkatan signifikan dimana pada 2011 proposal yang diterima 46 buah dengan jumlah dana Rp. 3.917.167.000,- selanjutnya sampai dengan 2014 proposal yang diterima meningkat menjadi 595 buah dengan jumlah anggaran dana sebesar Rp. 8.972.512.5000,- (Renstra UPI, 2016-2020 : 25).

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengacu pada konsep, asas, prinsip, tujuan dan model-model pendekatan di dalam memecahkan masalah melalui pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia, agar di dalam pelaksanaan program di masyarakat tercermin karakteristik keahlian dari perguruan tinggi yang diembannya. Mengacu dari hal tersebut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Indonesia memandang perlu diterbitkannya Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia (Renstra UPI).

B. Pengertian RENSTRA

Rencana strategis merupakan alat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengelola kondisi saat ini dan melakukan proyeksi kondisi yang akan datang. Dengan demikian, rencana strategis

merupakan sebuah pedoman dalam pengembangan organisasi lima tahun ke depan (Kerzner, 2001). Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu program Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia (LPPM UPI) yang dilaksanakan melalui payung, skema, dan topik-topik pengabdian kepada masyarakat. Payung pengabdian kepada masyarakat di lingkungan LPPM UPI diantaranya sebagai berikut:

- a. Ilmu pendidikan dan disiplin ilmu untuk pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian.
- c. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat yang melembaga berbasis kemitraan.
- d. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Pengembangan model pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat.
- f. Penguatan dan pengembangan Kuliah Kerja Nyata Tematik.
- g. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis desa binaan.

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia menganut prinsip inter dan multi disiplin, kolaborasi baik lintas unit, lintas bidang ilmu yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia atau lintas institusi dan perguruan tinggi di Indonesia, bahkan melalui berbagai kerjasama atau kemitraan institusi dan universitas di luar negeri dan lembaga lain, seperti lembaga swadaya masyarakat dan industri.

C. Tujuan Penyusunan RENSTRA

Penyusunan RENSTRA Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia ditujukan untuk:

1. Memberikan arah dan kerangka kebijakan dan pengelolaan

pengabdian kepada masyarakat secara jelas bagi pencapaian target-target pengabdian secara langsung (output) dan tidak langsung (outcome) dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020).

2. Memberikan arahan bagi institusi untuk mengadakan perubahan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai aspek seperti perkembangan keilmuan, infrastruktur, dan berbagai sistem tata kelola menuju universitas pelopor dan unggul.
3. Memantapkan arah pengabdian kepada masyarakat menuju UPI sebagai lembaga yang berperan aktif dalam penyelesaian isu nasional dan global.

D. Pendekatan Penyusunan RENSTRA

Recana strategis disusun berdasarkan pendekatan eksploratif dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Menganalisis identitas organisasional institusi (UPI) melalui analisis SWOT.
2. Mengembangkan rencana strategis dan menerjemahkannya ke dalam payung, skema, dan topik pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai prioritas strategis pengembangan.

BAB II

LANDASAN PENGEMBANGAN

Ada beberapa hal yang menjadi landasan pengembangan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat UPI, yaitu visi dan misi UPI, landasan hukum, analisis situasi saat ini terkait dengan riwayat perkembangan UPI, situasi global, nasional, dan daerah serta analisis SWOT UPI. Masing-masing landasan akan dipaparkan di bawah ini:

A. Visi

Visi UPI adalah menjadi Universitas Pelopor dan Unggul (*leading and outstanding university*). UPI menargetkan pada tahun 2020 menjadi Universitas Pelopor dan Unggul dalam bidang Pendidikan di ASEAN (*a leading and outstanding university in education in ASEAN*). Visi tersebut ditempuh diantaranya melalui pengembangan arah kebijakan dan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis inovasi dan hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat.

B. Misi

UPI telah menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu lainnya;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian Kepada masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktik pendidikan serta keilmuan lain yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal;
3. Mengembangkan pendidikan profesional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan

4. Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.

Selain itu, karena pengelolaan pengabdian pada masyarakat di UPI dilakukan oleh LPPM, pengembangan RENSTRA ini juga didasarkan pada misi LPPM, sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memantapkan kedudukan dan fungsi LPPM sebagai lembaga pendukung universitas dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UPI yang diwarnai suasana ilmiah yang terwujud dalam iklim keteladanan “silih asah, silih asih, silih asuh” antar berbagai komponen sivitas akademika.
2. Menjadikan dosen dengan kemampuan handal dalam menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, menghasilkan kekayaan intelektual, dan mendesiminasikannya kepada masyarakat.
3. Memperkuat karakteristik ilmiah dalam kinerja LPPM UPI untuk menghasilkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
4. Mewujudkan tridharma perguruan tinggi secara terintegrasi, terpadu dan saling menguatkan antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mewujudkan tridharma perguruan tinggi untuk mengembangkan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya serta untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Memantapkan dan peningkatan mutu layanan profesional di bidang pendidikan dan bidang lainnya.
7. Mewujudkan dan menciptakan kemandirian LPPM UPI dalam menumbuhkembangkan profit center, melalui *networking* dengan seluruh stakeholders baik dalam negeri maupun luar negeri.

8. Mendorong penelitian untuk mengembangkan teori dan praktek pendidikan, non pendidikan dan keilmuan lainnya yang inovatif dan berbasis kearifan budaya lokal.
9. Mendorong terciptanya budaya meneliti dan mengabdikan di kalangan sivitas akademika UPI.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum RENSTRA PKM adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti

2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2016-2020.

D. Analisis Situasi Saat Ini

Bagian ini akan memaparkan beberapa aspek yang merupakan hasil dari analisis situasi saat ini yang menjadi dasar dari penyusunan RENSTRA PkM. Analisis situasi ini mencakup beberapa aspek terkait UPI sendiri maupun situasi di luar universitas yang tentu berdampak terhadap berbagai kebijakan universitas, khususnya di PkM. Untuk itu, pemaparan terkait analisis situasi saat ini akan terdiri dari beberapa hal, termasuk riwayat perkembangan kelembagaan UPI, potensi sumber daya UPI, capaian kinerja di bidang PkM, fokus PkM instansi luar (daerah dan nasional), peran lembaga pengelola PkM di UPI, dalam hal ini LPPM, dan analisis SWOT UPI.

1. Riwayat Perkembangan Kelembagaan

Perkembangan Universitas Pendidikan Indonesia dimulai dengan didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1954 dengan misi utama untuk menghasilkan guru/tenaga pendidik.

Tahun 1957, PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang merupakan bagian dari Universitas Padjadjaran sebagai universitas negeri baru yang didirikan Pemerintah pada saat itu. Kemudian pada tahun 1963, Pemerintah mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan guru di tingkat perguruan tinggi ke dalam Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang salah satunya adalah IKIP Bandung. Pada tahun 1999 status IKIP Bandung berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999.

Pada tahun 2004 status UPI, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004, berubah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT.BHMN).

Pada tahun 2010 status UPI berubah lagi, dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2010, menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTP PK-BLU).

Terakhir, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, UPI ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN bh). Saat ini UPI menyelenggarakan pendidikan pada delapan fakultas, yaitu: (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), (2) Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), (3) Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), (4) Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), (5) Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), (6) Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan (FPOK), (7) Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), serta (8) Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD). Pendidikan pascasarjana dikelola oleh Sekolah Pascasarjana (SPs). Kedelapan fakultas tersebut membina 134 program studi, yaitu 6 program studi D3, 75 program studi S1, serta 53 program pascasarjana yang terdiri atas 36 program magister dan 17 program doktor.

Selain jumlah program studi, perkembangan juga terjadi pada jenis program studi yang diselenggarakan. Pada saat ini UPI menyelenggarakan program studi kependidikan dan non-kependidikan. Keberadaan dan perkembangan program-program studi kependidikan merupakan salah satu perwujudan dari komitmen UPI sebagai universitas yang menempatkan kependidikan sebagai jati dirinya. Program- program studi kependidikan yang dibuka, diselenggarakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan guru berbagai mata pelajaran tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pendukung penyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan ilmu dan praktek kependidikan.

Program studi non kependidikan, yang sekarang berjumlah 30 program studi, diselenggarakan UPI untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan merupakan wujud dari tanggung jawab UPI sebagai 'universitas'. Dalam penyelenggaraan program studi kependidikan dan non kependidikan, UPI telah mencoba untuk menerapkan dan menyempurnakan prinsip *cross fertilization* yaitu prinsip saling menguatkan di antara keduanya.

Komitmen Universitas terhadap mutu penyelenggaraan program studi diwujudkan dengan upaya sistematis dan berkelanjutan melalui peningkatan jumlah program studi yang terakreditasi. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh badan akreditasi nasional, pada tahun 2013 UPI juga tengah mengupayakan akreditasi atau sertifikasi oleh institusi internasional seperti ISO 9001 dan oleh ASEAN University Network (AUN) terhadap 6 prodi yang menyelenggarakan integrasi pendidikan S1, S2, dan S3.

Sebagai universitas yang berjati diri kependidikan, perhatian terhadap penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan guru terus menerus digalakkan. Hasil pemikiran parapemerhati pendidikan di universitas ini serta hasil benchmarking dengan para pemikir pendidikan dari berbagai penjuru dunia telah melahirkan konsep pendidikan guru yang dituangkan dalam buku "Re-Desain Pendidikan Profesional Guru". Selain secara konseptual, partisipasi UPI dalam melahirkan guru yang profesional juga dilakukan dengan berupaya keras menyukseskan berbagai program pemerintah seperti, penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi (PPGT) basic sains, PGSD dan SMK, serta program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM-3T). Melalui program-program ini, sampai saat ini UPI telah melahirkan 112.600 orang guru profesional.

Untuk menjalankan fungsi pengembangan ilmu, dalam sepuluh tahun terakhir UPI telah meluncurkan berbagai skema pembiayaan penelitian.

Dalam 5 tahun terakhir, jumlah penelitian yang dilakukan dosen UPI rata-rata berkisar antara 350 sampai dengan 400 judul dengan total dana penelitian mencapai Rp. 16-20 milyar. Hasilnya, gairah meneliti dan mengembangkan ilmu di kalangan dosen dan mahasiswa menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah dosen yang melakukan dan mendapat dana Penelitian, baik dana yang dikururkan oleh DIKTI maupun dana dari pengembangan universitas dan dana dari lembaga lain, melalui kerjasama penelitian. Dibandingkan dengan sepuluh tahun yang lalu, dewasa ini, kesadaran bahwa dosen adalah “guru dan pengembang ilmu” jauh lebih baik dan berkembang di kalangan dosen UPI. Terkait pengembangan ilmu pendidikan dan profesionalisme guru, secara khusus UPI mengembangkan skema penelitian etnopedagogi dan skema penelitian PPG.

Berdasarkan laporan Tengah tahun UPI Tahun 2015, diperoleh informasi bahwa rata-rata jumlah publikasi yang dihasilkan dosen UPI berkisar selama tiga tahun terakhir, berada pada kisaran 450-550 publikasi setiap tahunnya. Jenis publikasi tersebut terdiri atas publikasi pada prosiding, jurnal nasional, dan jurnal internasional, serta buku. Khusus untuk publikasi internasional jumlah rata-rata setiap tahunnya berkisar antara 100-200 judul publikasi, yang tersebar dalam berbagai jurnal yang terindeks.

Namun demikian, upaya keras masih harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal-jurnal internasional yang terujuk dan terindex sistem database seperti SCOPUS, Zentralblatt, dan Thomson Reuters. Khusus untuk SCOPUS, sampai dengan bulan November tahun 2015, baru terdapat 179 artikel dosen UPI yang terindeks SCOPUS. Jumlah yang masih relatif kecil untuk sebuah perguruan tinggi otonom sebesar UPI.

Berbeda dengan publikasi pada jurnal dan buku, luaran penelitian lain berupa Hakatas Kekayaan Intelektual (HKI), mengalami peningkatan

jumlah yang signifikan. Sebelum dibentuk unit yang mengurus HKI pada tahun 2013, yaitu Sentra HKI UPI, jumlah perolehan HKI sejak mulai UPI berdiri sampai dengan tahun 2012 adalah baru sebesar 27 buah. Tetapi sejak dibentuknya Sentra HKI UPI, perolehan jumlah HKI sampai dengan tengah tahun 2015 meningkat tajam yaitu sebanyak 107 buah. Ke 107 HKI tersebut terdiri atas 96 Hak Cipta, 9 hak Paten, dan 2 Disain Industri.

Kinerja di bidang publikasi dan produk-produk ilmiah lainnya menjadi sangat penting karena jumlah publikasi internasional merupakan komponen penting dalam sistem pemeringkatan dan rekognisi internasional terhadap sebuah perguruan tinggi. Di samping itu, sistem alokasi pendanaan negara kepada PTNbh, melalui BOPTN-bh, menempatkan kinerja penelitian dan publikasi sebagai dasar utama dalam penentuan besaran anggaran negara yang akan dialokasikan.

Untuk mendukung kualitas penyelenggaraan berbagai program akademik, penguatan jejaring internasional, telah menjadi perhatian universitas ini. Sebanyak 59 *Memorandum of Understanding* (MoU) telah ditandatangani bersama berbagai universitas di 17 negara. Implementasi nota kesepahaman ini direalisasikan dalam bentuk program akademik, seperti *credit transfer*, *sandwich program*, *staff and student exchanges*, kerja sama penelitian, dan pelatihan dosen. Penyelenggaraan berbagai *event internasional* di UPI seperti Konferensi Internasional UPI-UPSI, *Osaka in the Word*, *One Asia*, dan *International TVET Conference*, konferensi WALIS (World Association of Lesson Study), Kongres Internasional Linguistik Sistemik Fungsional (*The International Congress of Systemic Functional Linguistics*) yang akan diselenggarakan pada tahun 2016, juga merupakan bentuk implementasi kerjasama dan kepercayaan internasional terhadap universitas.

Pengakuan internasional juga diraih UPI melalui berbagai sistem pemeringkatan perguruan tinggi. Peringkat dua bintang yang diperoleh dari QS-Star berarti bahwa, UPI dinilai aktif dalam melakukan penelitian,

memiliki reputasi dan memegang peranan kunci pada tingkat nasional, dan telah mulai mendapat pengakuan internasional. Posisi yang cukup baik juga diperoleh UPI pada sistem pemeringkatan lain seperti *webometrics* dan *Telcom Smart Campus* (TeSCa).

UPI memiliki enam kampus yang tersebar di beberapa lokasi, yaitu (1) UPI Kampus Bumi Siliwangi (363.378 m²), (2) UPI Kampus Cibiru (30.030 m²), (3) UPI Kampus Tasikmalaya (33.161 m²), (4) UPI Kampus Purwakarta (39.835 m²), (5) UPI Kampus Sumedang (9.860 m²), dan (6) UPI Kampus Serang (44.050 m²). Setiap kampus UPI di Daerah dilengkapi dengan gedung perkuliahan moderen dengan konektivitas internet yang memadai, dan fasilitas laboratorium untuk membekali keterampilan mahasiswa. Sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan fokus utama pada bidang pendidikan termasuk pendidikan guru. UPI mengelola 8 sekolah laboratorium yang berfungsi sebagai *teaching school* atau pusat pengembangan ilmu dan praktek kependidikan. Untuk mendukung layanan pendidikan dan informasi yang lengkap dan mutakhir kepada sivitas akademika, UPI memiliki Sistem Informasi Akademik (SIAK) yang mendukung seluruh proses akademik dan perpustakaan secara online. Konektivitas dan layanan jaringan internet telah tersedia pada setiap kampus. Terkait dengan itu, digitalisasi konten riset dan pembelajaran serta kegiatan e-learning masih harus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Sumber daya manusia UPI berjumlah 1.260 dosen dan 694 tenaga kependidikan. Tenaga dosen yang ada terdiri atas 79 guru besar, 372 doktor, serta 829 magister. Kapasitas sumber daya yang dimiliki ini, masih harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan jumlah dan proporsi guru besar dan dosen bergelar doktor harus menjadi prioritas pengembangan. Disamping itu, perhatian harus diberikan UPI agar produktifitas dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang

bermutu dan produk keilmuan lainnya dapat meningkat dan bersaing pada tataran global. Sebagai upaya dalam mewujudkan *good university governance*, UPI telah menunjukkan kinerja yang baik terutama dalam pengelolaan keuangan. Perolehan opini Wajar tanpa Pengecualian (WtP) atas audit keuangan UPI telah menjadi tradisi sejak tahun 2008. Namun demikian efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan masih harus ditingkatkan agar dapat mendorong kinerja dan pencapaian yang lebih baik.

2 Potensi Sumber Daya Manusia

Upaya peningkatan mutu manajemen dan sumber daya di UPI yang meliputi sumber daya manusia, aset dan fasilitas serta perpustakaan terus berjalan dan berkembang dengan serangkaian tantangan dan hambatan. Sekaitan dengan pengembangan SDM, beberapa hal penting ditemukan sebagai bahan untuk refleksi dan upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Pertama, data kualifikasi dosen menunjukkan bahwa target renstra di tahun 2014 mengenai kualifikasi pendidikan minimal S-2 sebanyak 100% belum dapat terpenuhi mengingat saat ini baru 97,3% dosen yang telah berkualifikasi minimal S-2. Namun demikian target 35% dosen berkualifikasi pendidikan S-3 telah dapat terpenuhi, mengingat UPI sampai akhir Tahun 2014 telah memiliki 35,6% dosen yang bergelar doktor. Terkait jumlah guru besar, target 110 orang guru besar di UPI hingga tahun 2014 belum dapat terpenuhi. UPI sampai dengan akhir tahun 2013 tercatat memiliki 76 orang dosen bergelar guru besar atau sekitar 6,1% dari keseluruhan dosen. Target pencapaian jumlah guru besar pada tahun-tahun ke depan akan menjadi tantangan tersendiri mengingat semakin kompleksnya proses administratif dan uji substansi untuk pengajuan guru besar belakangan ini.

Kedua, kualifikasi tenaga administrasi di UPI secara umum masih

didominasi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan SMA (48,3%). Apabila mengacu kepada target peningkatan kualitas pelayanan akademik yang lebih profesional, kualitas sumber daya tenaga administrasi perlu mendapat perhatian secara khusus mengingat tak dapat dipungkiri bahwa layanan administrasi menjadi salah satu kunci dari manajemen yang sehat.

3. Manajemen Aset dan Fasilitas

Terkait peningkatan mutu manajemen berbasis TIK, UPI terus-menerus berbenah diri dan melakukan beberapa terobosan baru. Direktorat TIK UPI, misalnya, telah mengembangkan Sistem Informasi Eksekutif Akademik (SIE Akademik). Sistem ini ke depannya diharapkan dapat ikut mendorong percepatan penerapan sistem manajemen terintegrasi berbasis TIK secara efektif dan bersumber dari satu pintu. Dengan mulai dikembangkannya sistem ini diharapkan kualitas akurasi data akademik UPI akan semakin meningkat sehingga lebih memudahkan pihak-pihak pengambil kebijakan dalam mengambil kesimpulan dan menentukan tindakan yang lebih realistis yang sesuai dengan basis data dan kenyataan di lapangan. Sementara itu, dari sisi pemanfaatan fasilitas TIK terkait pembelajaran, Direktorat TIK UPI telah mengembangkan sistem web terpusat (SPOT) untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis *e-learning* atau *Learning Management System* (LMS). Sebanyak 304 mata kuliah dari 136 dosen telah memanfaatkan sistem web terpusat berupa aplikasi *e-learning* (SPOT). Penguatan kembali literasi TIK dosen dan upaya sistematis untuk mendorong pemaksimalan sistem yang telah ada perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan, sehingga ke depannya akan tercipta kultur akademik yang adaptif dengan perkembangan teknologi terkini. Direktorat TIK UPI juga telah meningkatkan kapasitas TIK melalui penggunaan teknologi *core switch* untuk jaringan di UPI. Perkembangan jaringan internet UPI dari segi kapasitas bandwidth dan

konektivitas internet dan intranet terjadi peningkatan sebesar 70,2% dari 235 Mbps pada tahun 2013 menjadi 400 Mbps pada tahun 2014.

Berkaitan dengan peran perpustakaan untuk menunjang kegiatan akademik, UPI secara bertahap terus mengembangkan perpustakaan baik dari sisi tata kelola, peningkatan jumlah koleksi pustaka, dan pemanfaatan TIK dalam pengelolaan perpustakaan. Sejauh ini, perpustakaan UPI mampu menempati peringkat ke-20 sebagai perpustakaan yang paling sering dirujuk di antara perguruan tinggi se- Indonesia versi *Webometrics*. Bentuk kendala yang teridentifikasi selama ini yang masih perlu dibenahi dan ditingkatkan antara lain (1) penambahan koleksi hard copy jurnal ilmiah, (2) peningkatan literasi TIK SDM perpustakaan, dan (3) masih bergantungnya sebagian pengguna perpustakaan kepada para pustakawan walaupun rambu-rambu telusur alat elektronik yang jelas telah disediakan.

4. Peran LPPM

Universitas sangat berperan dalam mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat. Namun demikian, seperti telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dari RENSTRA PkM ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UPI oleh lembaga khusus yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat LPPM. Namun demikian, setiap unit mulai dari program studi sampai rektorat memiliki peran penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di universitas. Struktur organisasi UPI dan penanggung jawab kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilihat pada Gambar 2.3

langsung kepada Rektor.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kebijakan kegiatan PkM Universitas telah dituangkan dalam Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia (Renstra UPI) yang pertama (2006-2010) dan yang kedua (2011-2015), dan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UPI periode 2016-2040.

Dalam Renstra UPI tahun 2011-2015, khususnya, telah ditetapkan peningkatan kualitas bidang pengabdian kepada masyarakat sebagai prioritas utama. Untuk mendukung peningkatan kualitas PkM itu telah ditetapkan kebijakan dan program, yaitu:

- a. Peningkatan mutu PkM.
- b. Penguatan arah kebijakan PkM universitas.
- c. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis hasil PkM.
- d. Peningkatan sarana dan sumber belajar yang berorientasi PkM.
- e. Penyediaan dukungan fasilitas kegiatan PkM, publikasi internasional, dan perolehan HKI.

Dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan program-program pengabdian kepada masyarakat, di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat telah dibentuk Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata. Untuk lebih mengoptimalkan peran LPPM dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat, LPPM memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengarahkan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Litabmas) untuk kemajuan IPTEKS berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
2. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui program unggulan bertaraf nasional dan internasional.
3. Mendorong perolehan HKI.
4. Mendorong pelibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.

5. Memfasilitasi sarana dan prasarana Litabmas yang mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat pengguna.
6. Mengembangkan kapasitas pengelolaan pada unit pelaksana PkM sebagai wahana penelitian multi, lintas dan interdisipliner.
7. Melaksanakan penilaian proposal Litabmas dalam rangka meningkatkan relevansi, keberlangsungan, efisiensi dan akuntabilitas.
8. Menyelenggarakan penerapan standar mutu Litabmas dan akreditasi kompetensi sarana dan prasarana Litabmas.
9. Melakukan penggalangan sumber daya Litabmas melalui kegiatan Litabmas kompetitif yang bersinergi dengan DUDI, institusi penelitian dan pemerintah.
10. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Abmas) sebagai penerapan IPTEKS yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan keunggulan pengelolaan program pendidikan sekolah dan luar sekolah serta industri kecil, menengah, dan besar.
11. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik mahasiswa sebagai wahana penerapan IPTEKS secara interdisipliner.
12. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat melalui pendidikan keterampilan fungsional.
13. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagai katalisator, dan penghubung antar sistem.

Selama ini, LPPM telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan hal ini terlihat dari perkembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UPI khususnya.

5. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan analisis situasi saat ini terkait UPI, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat. Beberapa hal yang akan dikemukakan dalam analisis SWOT ini telah pula dipaparkan dalam beberapa bagian dari pemaparan aspek-aspek lain yang dianalisis terkait situasi saat ini, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat.

Berikut akan dipaparkan analisis SWOT terkait PkM yang telah dan akan dilakukan UPI.

a. Kekuatan

Kekuatan yang ada di UPI, khususnya terkait pengabdian kepada masyarakat, bisa dipaparkan sebagai berikut:

- 1) UPI sebagai PTNbh memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan kebijakan dan program termasuk dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 2) UPI PTN bh dapat menjadi sebuah lembaga untuk menciptakan kultur baru berwawasan manajemen strategik, khususnya di bidang PkM.
- 3) Capaian kinerja bidang PkM berdasarkan Renstra UPI 2011-2015 menunjukkan peningkatan jumlah PkM, dana, dan luaran PkM. Hal ini dapat menjadi modal dasar untuk pencapaian Renstra 2016-2020.
- 4) Telah disusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas 2016-2040, yang menempatkan penelitian sebagai salah satu rencana strategis universitas.
- 5) Telah ditetapkan program pengembangan dosen dan kapasitas institusi di lingkungan UPI oleh SK Rektor UPI Nomor 0652/H40/HK/2011.
- 6) Jumlah dan kualifikasi dosen berdasarkan latar belakang pendidikan dan kepakaran program studi cukup baik untuk pengembangan riset.

- 7) Budaya riset di kalangan dosen sudah tumbuh dengan baik seperti ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah proposal yang didanai secara kompetitif baik oleh UPI, DIKTI, maupun lembaga mitra.
- 8) Jumlah dana PkM baik dari UPI, Ditjen DIKTI, maupun sumber lain setiap tahunnya mengalami peningkatan.
- 9) Telah dijalinnya MoU yang menaungi kegiatan PkM dengan lembaga mitra baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 10) Struktur organisasi UPI yang menempatkan LPPM sejajar dengan unit akademik setingkat fakultas, memberi kekuatan bagi terlaksananya pengelolaan PkM secara profesional dan komprehensif.
- 11) Fasilitas gedung, sarana dan laboratorium yang dimiliki UPI sangat memadai dan sangat mendukung dalam mengembangkan program PkM.
- 12) Telah terbentuk lembaga yang khusus menangani pengurusan Hak Kekayaan Intelektual.

b. Kelemahan

Kelemahan yang ada di UPI, terkait PkM, yang harus mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan di antaranya bisa dilihat dalam berbagai aspek berikut.

- 1) Manajemen PkM masih memerlukan waktu untuk dapat berjalan secara efisien dan efektif serta memerlukan peningkatan fungsi-fungsi manajemen secara baik yang didukung dengan kualitas SDM yang memadai.
- 2) Hasil-hasil PkM belum terpublikasikan secara optimal baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terujuk.
- 3) Hasil PkM belum bisa menghasilkan karya yang menunjukkan kreativitas dan inovasi sebagai sebuah luaran PkM.
- 4) PkM di kalangan dosen masih mengandalkan sumber dana UPI dan DIKTI, sedangkan dari sumber mitra dan dunia usaha dan dunia

industri belum tergali dengan optimal.

- 5) Pengakuan produk PkM dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (paten dan hak cipta) jumlahnya masih sedikit.
- 6) PkM terapan yang merupakan kerjasama antara universitas dengan universitas lain dan industri yang menerapkan disiplin ilmu masih terbatas.
- 7) PkM yang melibatkan mahasiswa untuk membantu percepatan studi mahasiswa belum banyak dilakukan.
- 8) UPI sebagai PTNbh satu-satunya dari kelompok LPTK belum menunjukkan kepeloporan dalam hal media, teknologi, alat evaluasi, dan manajemen pendidikan untuk memperbaharui sistem pendidikan yang ada.
- 9) PkM terkait kepemimpinan lembaga dan keterkaitan antara berbagai sistem dan kebijakan yang ada di UPI untuk perbaikan universitas belum dilakukan secara komprehensif.
- 10) PkM terkait kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggiring UPI menjadi universitas pelopor dan unggul belum banyak dilakukan.
- 11) PkM yang melibatkan keterkaitan antara universitas, sekolah, dan lapangan kerja belum dilakukan secara komprehensif; untuk menjamin kesesuaian antara kompetensi lulusan UPI dengan kebutuhan lapangan kerja.
- 12) PkM tentang partisipasi kelompok minoritas dalam pendidikan, termasuk masyarakat di daerah Terluar, Terdalam, dan Terpencil (3T), belum dilakukan secara komprehensif.
- 13) PkM tentang kemampuan membaca dan menulis dan kemampuan numerasi peserta didik belum dilakukan secara komprehensif.
- 14) PkM tentang kebijakan dan program pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah belum banyak dilakukan, sehingga UPI belum bisa memberikan masukan tentang kebijakan dan program

tersebut.

- 15) PkM kolaborasi antara sivitas akademika UPI dengan kelompok praktisi di lapangan belum dilakukan secara komprehensif.
- 16) PkM terkait unsur-unsur utama ilmu pendidikan yang memfokuskan pada filsafat pendidikan, pendidik, peserta didik, sumber belajar, manajemen, dan kebijakan pendidikan belum banyak dilakukan.
- 17) Pencitraan UPI sebagai universitas yang mengedepankan bidang pendidikan, selain merupakan kekuatan, juga dapat membuat UPI dipandang kurang memiliki kompetensi di bidang non pendidikan termasuk teknologi.
- 18) UPI belum banyak memiliki jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal Internasional bereputasi.

c. Peluang

- 1) Teralokasikannya dana PkM yang cukup memadai, terutama dana dana pemerintah dan swasta, memberi peluang kepada UPI untuk bisa berpartisipasi dalam pengembangan PkM yang lebih komprehensif.
- 2) Tekanan persaingan global terkait kualitas universitas memberikan peluang kepada UPI untuk bekerja sama dengan universitas di berbagai negara, yang sama-sama memerlukan kerja sama dengan universitas di luar negeri untuk meningkatkan daya saingnya.
- 3) Kebijakan pendidikan di berbagai negara Asia memberikan peluang kepada UPI untuk melakukan PkM kerjasama dan multidisiplin.
- 4) Sedikitnya universitas di Indonesia yang memfokuskan perhatiannya pada pendidikan, seperti UPI. Hal ini memberi peluang kepada UPI untuk terus mengembangkan PkM di bidang pendidikan khususnya, untuk menjadi universitas pelopor dan unggul, khususnya di bidang pendidikan, dan juga di bidang disiplin ilmu lainnya.
- 5) Kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pendidikan dan

bidang lain yang terkait pendidikan memberi peluang kepada sivitas akademika UPI untuk bisa melakukan PkM yg selaras dengan program pemerintah daerah.

- 6) Dibentuknya kementerian pendidikan dasar dan menengah memberi peluang kepada UPI untuk bisa berkiprah lebih banyak terkait pengembangan pendidikan dasar dan menengah.
- 7) DIKTI, Kementerian Ristek dan lembaga mitra lainnya di dalam dan luar negeri banyak meluncurkan program PkM baik dalam kerangka kerjasama maupun hibah kompetitif.
- 8) Bergabungnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Riset dan Teknologi dalam sebuah kementerian baru yang memberikan peluang dalam peningkatan jumlah dana PkM di perguruan tinggi.
- 9) Pemeringkatan universitas secara internasional mengharuskan universitas di dunia untuk melakukan kerjasama dengan berbagai universitas lainnya. Hal ini memberi peluang kepada UPI untuk dapat bekerja sama dengan universitas lain di dunia.

d. Tantangan

- 1) Adanya trend peningkatan jumlah perguruan tinggi yang berkualitas baik dalam negeri maupun luar negeri akan menyebabkan semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan dana PkM dari lembaga mitra.
- 2) Stakeholders menuntut kinerja PkM yang dilakukan sivitas akademika UPI dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
- 3) Perubahan dinamika yang terjadi di kalangan stakeholders bisa membuat kerjasama yang sudah terjalin dengan stakeholders terputus.
- 4) Berbagai kebijakan PkM menuntut perguruan tinggi untuk

menghasilkan luaran PkM yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

- 5) Bergabungnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Riset dan Teknologi memberikan tantangan bagi UPI untuk bersinergi dengan lembaga nirkementerian (LIPI, Lapan, BPPT, Batan, Bapeten, BIG, dan BSN).
- 6) Beberapa isu global (seperti yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, tahun 2014), seperti isu terkait masalah perempuan, anak-anak berkebutuhan khusus, peningkatan kualitas populasi, kemampuan literasi, perubahan iklim, menuntut universitas untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu-isu tersebut, dan isu lain terkait ekonomi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi.
- 7) Tantangan nasional menuntut UPI sebagai universitas untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah nasional, yang mencakup:
 - a) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi secara massif.
 - b) Berkembangnya keanekaragaman layanan program pendidikan tinggi.
 - c) Peningkatan daya saing yang menempatkan peringkat pendidikan tinggi sebagai ukuran dan rekognisi mutu universitas.
 - d) Terbukanya jaringan pengetahuan masyarakat yang memupuk pemahaman nilai-nilai ekonomi hasil pendidikan tinggi.
 - e) ICT yang semakin fasilitatif bagi terbukanya peluang mengikuti program- program pendidikan tinggi jarak jauh.
 - f) Internasionalisasi pendidikan tinggi peningkatan pendapatan masyarakat mendorong eskalasi sosial melalui investasi pembelajaran bermutu di perguruan tinggi.

BAB III

GARIS BESAR RENSTRA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bab ini akan memaparkan arah dan kebijakan RENSTRA pengabdian kepada masyarakat (PkM), tujuan dan sasaran RESTRA PkM, strategi dan kebijakan unit kerja serta payung dan tema PkM.

A. Arah dan Kebijakan RENSTRA PkM

1. Arah dan Kebijakan PkM Tingkat Nasional

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Bagian Kesebelas tentang Pengabdian kepada masyarakat Pasal 47 ayat (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika. (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

Bagian Keduabelas mengenai Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 48 ayat (1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas Penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK. (4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang Penelitian.

b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan arah pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara.

3) Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum

Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.

4) Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu

Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia

memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

5) Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan, sekaligus sebagai penopang system kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi

aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

- 8) Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional

Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanat konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar secara geografis dan jumlah penduduk, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang dan potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, mandiri, adil dan makmur, Indonesia sangat penting untuk berperan aktif dalam politik luar negeri dan kerja sama lainnya baik di tingkat regional maupun internasional, mengingat konstelasi politik dan hubungan internasional lainnya yang terus mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat.

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019

Ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai: a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional; c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah; d. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional.

Kemudian RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

d. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria yang meliputi: a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2) Standar isi pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa

sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah, serta hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3) Standar proses pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program,

dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.

6) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

Merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,

Merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat,

Merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

e. Agenda Riset Nasional 2016-2019

Secara lebih spesifik, Agenda Riset Nasional 2016-2019 disusun untuk mendukung pemerintah khususnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam mendorong proses hilirisasi dan komersialisasi hasil riset kepada dunia usaha atau industri. Hal ini dilakukan karena meskipun telah banyak penelitian yang dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga litbang, tetapi sangat sedikit sekali yang dimanfaatkan oleh industri. Untuk itu Agenda Riset Nasional 2016-2019 akan lebih memprioritaskan riset-riset yang telah siap atau memiliki prospek bagus untuk dihilirkan kepada industri. Dengan demikian kegiatan riset diharapkan dapat lebih berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Aspek lain yang diperhatikan dalam Agenda Riset Nasional 2016-2019 adalah perlunya peningkatan kerjasama antar pelaku riset, dan antara pelaku riset dengan industri. Agenda Riset Nasional akan memprioritaskan kegiatan riset yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi atau konsorsium. Hal ini diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya duplikasi riset, meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya, dan meningkatkan peluang kerjasama antara peneliti dengan dunia usaha dalam proses komersialisasi hasil riset. Melalui strategi ini maka Agenda Riset Nasional dapat menghasilkan riset yang mendukung daya saing sektor produksi barang dan jasa, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, serta penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.

Di dalam Agenda Riset Nasional ini, terdapat 8 (delapan) bidang riset diantaranya 1) Bidang Pangan dan Pertanian, 2) Energi, 3) Transportasi, 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi; 5) Teknologi Pertahanan dan Keamanan; 6) Kesehatan dan Obat; 7) Material Maju dan 8) Sosial Humaniora.

2. Arah dan Kebijakan PkM UPI

a. Arah dan Kebijakan PkM menurut Statuta UPI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia pada bagian Keempat mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 16 ayat (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sivitas akademika dengan memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pendidikan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan, metode, dan kegiatan sesuai dengan keahlian sivitas akademika serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk pengembangan penelitian dan pendidikan. (4) Program pengabdian kepada masyarakat didanai oleh UPI dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan UPI. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan MWA.

b. Arah dan Kebijakan PkM menurut Peraturan MWA UPI

Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/Per/MWA UPI/2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia pada bagian ketiga mengenai Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 21 (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika dengan memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian dan pendidikan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) UPI menyusun rencana pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang memuat kebijakan dan program pengembangan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi UPI. (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika

berdasarkan otonomi keilmuan, norma, etika, dan budaya akademik yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengembangan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 22 (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode sesuai dengan keahlian sivitas akademika serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan penguatan kompetensi Sivitas Akademika.

Pasal 23 (1) Program pengabdian kepada masyarakat didanai oleh UPI dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan UPI. (2) UPI mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 5% dari dana yang bukan merupakan pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh UPI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 24 (1) UPI dapat mengajukan permohonan kepada lembaga pemerintah dan/atau lembaga bukan pemerintah untuk memperoleh penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika UPI yang: (a) diterbitkan dalam jurnal internasional; (b) dipatenkan dan dimanfaatkan oleh industri, atau (c) dimanfaatkan sebagai teknologi tepat guna. (2) UPI memberikan penghargaan kepada sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dapat memberikan penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika UPI yang: (1) telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas; (b) diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional terujuk; atau (c) disampaikan dalam forum ilmiah nasional dan internasional yang bereputasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

penghargaan untuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pada Paragraf 4 Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia mengenai Pengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 73 (1) Pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengembangkan, memonitor dan mengevaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu dengan pusat kajian dan pengembangan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. (4) Pusat kajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas dan berfungsi mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara lintas disiplin. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

c. Arah dan kebijakan PkM menurut Renstra UPI

Dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Renstra UPI 2011-2015 mengembangkan arah kebijakan dan program pengabdian kepada masyarakat berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan arah dan kebijakan pengembangan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2016-2020 dengan memanfaatkan dan menyebarluaskan inovasi dalam berbagai disiplin ilmu. Kebijakan ini diwujudkan dalam program sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan merumuskan arah dan rencana induk pengabdian kepada masyarakat.

- b. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil penelitian, inovasi dan kewirausahaan.
- c. Meningkatkan partisipasi dan kontribusi UPI dalam berbagai agenda sosial dengan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri.

B. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat

Penyusunan RENSTRA ini, seperti telah dipaparkan dalam Bab I, bertujuan untuk:

- 1. Memberikan arah dan kerangka kebijakan dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat secara jelas bagi pencapaian target-target penelitian secara langsung (*output*) dan tidak langsung (*outcome*) dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020);
- 2. Memberikan arahan bagi institusi untuk mengadakan perubahan berbasis dalam berbagai aspek seperti modal manusia, perkembangan keilmuan, infrastruktur, dan berbagai sistem tata kelola menuju universitas pelopor dan unggul;
- 3. Memantapkan arah pengabdian kepada masyarakat UPI menuju UPI sebagai lembaga yang berperan aktif dalam penyelesaian isu nasional dan global.

Sementara itu, sasaran yang ingin dicapai dalam kurun 5 tahun (2016-2020) adalah sebagai berikut:

- 1. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Visi, Misi UPI, selaras dengan kebutuhan masyarakat dan program pemerintah daerah.
- 2. Mewadahi kepakaran dosen di dalam pengimplementasian keilmuan untuk pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan.
- 3. Terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terarah, berkualitas, dan berkesinambungan guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermakna dan

bermanfaat bagi kualitas pendidikan dan perwujudan masyarakat sejahtera.

4. Terwujudnya budaya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mengusung visi dan misi UPI dan pemerintah daerah.
5. Terwujudnya masyarakat akademik yang peduli dan tergerak untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
6. Terdapatnya hasil penelitian yang ditindaklanjuti dengan program pengabdian kepada masyarakat berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah kepada UPI sebagai universitas pelopor dan unggul.

C. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja

Sesuai dengan RPJP UPI tahun 2016-2020, strategi di bidang pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berorientasi program pemberdayaan masyarakat pedesaan/perkotaan, produk kebijakan pendidikan, dan penyelesaian isu-isu nasional dan global yang mempersiapkan mahasiswa dan masyarakat dibidang ekonomi kreatif guna menghadapi tantangan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Kebijakan manajemen dan orientasi pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerapan keilmuan baru, rumusan-rumusan kebijakan pemerintah, dunia usaha dan industri, serta kebermanfaatan bagi masyarakat, yang didukung dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.

Adapun pelaksana program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di lingkungan UPI adalah para dosen yang merupakan tenaga akademik yang wajib melakukan salah satu kegiatan tridharma perguruan

tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan oleh dosen berkolaborasi dengan mahasiswa dan masyarakat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat pada suatu program tertentu dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

D. Payung dan Tema Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Payung Pengabdian Kepada Masyarakat

Payung pengabdian kepada masyarakat UPI disesuaikan dengan Visi, Misi UPI dan kebutuhan masyarakat serta diselaraskan dengan program pemerintah daerah. Payung pengabdian kepada masyarakat dibuat dengan tujuan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang kepakaran. Payung pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan:

- a. Ilmu pendidikan dan disiplin ilmu untuk pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian;
- c. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat yang melembaga berbasis kemitraan
- d. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Pengembangan model pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat;
- f. Penguatan dan pengembangan Kuliah Kerja Nyata Tematik;
- g. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis desa binaan.

2. Tema pengabdian kepada masyarakat

a. Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang Ilmu (PkM Bidang Ilmu)

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Bidang Ilmu diarahkan untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat

dengan basis kepakaran fakultas, kampus daerah, atau program studi/departemen. Diharapkan muncul model program pengabdian kepada masyarakat sebagai program unggulan fakultas, kampus daerah, atau program studi/departemen. Program tersebut bisa berupa program-program yang dapat memecahkan masalah-masalah di masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta dapat memberikan timbal balik yang bermakna bagi penguatan visi dan misi universitas. PkM Bidang Ilmu dilandasi oleh hasil-hasil penelitian atau pengkajian yang telah dikembangkan fakultas, kampus daerah, atau program studi. Lingkup bidang ilmu yang dikembangkan meliputi disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya. Misi PkM Bidang Ilmu adalah meningkatkan peran dan fungsi disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lainnya dalam pemberdayaan masyarakat.

1) Tujuan

- a) Mendorong terintegrasikannya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang saling menguatkan.
- b) Mendorong teraplikasikannya hasil-hasil penelitian atau kajian bidang ilmu untuk memecahkan masalah dan memberdayakan masyarakat.
- c) Meningkatkan relevansi keilmuan yang dikembangkan UPI dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam pemberdayaan masyarakat.

2) Target/Luaran

Melalui PKM Bidang Ilmu diharapkan lahir model pengabdian kepada masyarakat dengan karakteristik keilmuan UPI dan penerapan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat dan hasilnya terdiseminasikan dalam bentuk artikel serta dipublikasikan pada jurnal/majalah nasional/internasional.

3) Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu meliputi masyarakat secara umum, baik perorangan, kelompok, maupun institusi, baik di perdesaan maupun perkotaan.

b. Program Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Desa Binaan Berbasis Kemitraan (PkM Desa Binaan)

Mengembangkan desa binaan merupakan pilihan yang tepat dan strategis baik untuk kepentingan UPI maupun kepentingan pembangunan nasional. Program ini diyakini akan memberikan dampak positif, yaitu membina sumber daya manusia di perdesaan dengan pendekatan pendidikan. Sedangkan dari sudut pembangunan nasional, desa merupakan tempat bermukimnya sebagian besar penduduk Indonesia. Sebanyak 90% penduduk Indonesia hidup di perdesaan; maka membangun desa sama dengan membangun bangsa. Desa merupakan inti dalam menopang keutuhan dan kemajuan bangsa. Dengan mengabaikan masyarakat desa, maka akan sulit untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu masyarakat perdesaan harus diberdayakan sesuai dengan kondisi dan potensinya masing-masing. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan desa binaan yang cocok baik bagi UPI maupun masyarakat. Pengembangan desa binaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dikelola melalui pengorganisasian yang dapat melibatkan semua unsur dan institusi mulai dari tingkat keluarga, RT, RW, Desa, Kecamatan, dan kabupaten, (2) dijalankan secara mandiri dan terus-menerus dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, (3) program disusun melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi, serta tindak lanjut, (4) dikembangkan prinsip-prinsip kemitraan dengan stakeholders, dan (5) diarahkan untuk menjadi lembaga yang mampu memperkuat struktur sosial masyarakat desa.

1) Tujuan

Melahirkan desa binaan dengan fungsi: 1) Sebagai wahana pencitraan untuk mempromosikan UPI kepada masyarakat. 2) Sebagai lokasi pilot project dalam menerapkan penemuan dan pengembangan IPTEKS andalan UPI yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. 3) Memperkuat dan mengembangkan kemitraan UPI dengan stakeholders. 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pendidikan, sehingga pendidikan menjadi modal dasar untuk mengembangkan pembangunan bidang lainnya.

2) Target/Luaran

- a) Terbentuknya model desa binaan yang didukung oleh stakeholders dengan basis kemitraan.
- b) Terlaksananya sejumlah program pemberdayaan masyarakat di lokasi desa binaan secara lintas sektoral dan terpadu dengan pembangunan pemerintah daerah.

3) Khalayak Sasaran

Sasaran utama pengembangan desa binaan adalah masyarakat perdesaan yang berada di wilayah yang selama ini sering menjadi lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen UPI maupun oleh mahasiswa, termasuk menjadi lokasi KKN tematik mahasiswa UPI.

c. Program Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan (PkM Kewirausahaan)

Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Namun, daya serap industri sebagai *end-user* hanya mencapai 10% sampai 15%. Dengan demikian, hampir setiap tahun terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dari lulusan perguruan tinggi yang belum terserap oleh dunia kerja. Jumlah lulusan UPI setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan pengembangan UPI, baik secara kelembagaan

maupun program. Sudah cukup lama UPI bermitra dengan stakeholders; hal ini terlihat dari berbagai kegiatan kemitraan seperti pelatihan-pelatihan, Kuliah Kerja Usaha (KKU), program co-op, magang, Program Mahasiswa Wirausaha (PMW), pengabdian dosen dan kegiatan lainnya. Kemitraan ini telah memberikan *feed back* yang sangat positif terutama dalam menumbuhkan dan mengembangkan program kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, program-program pembinaan kewirausahaan mahasiswa terus dikembangkan baik model maupun kebijakannya, sehingga lahir wirausahawan-wirausahawan baru di kalangan mahasiswa UPI.

1) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai:

- a) Menumbuh kembangkan iklim, budaya, jiwa, dan aktivitas kewirausahaan di lingkungan UPI.
- b) Mendorong terciptanya lulusan UPI yang mandiri dan menjadi wirausahawan baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menjadi mitra baru UPI sebagai pelaku usaha dalam penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan di lingkungan UPI.
- c) Memberikan feed back bagi UPI dalam meningkatkan kualitas dan relevansi pengembangan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan dunia kerja serta mengembangkan kemitraan UPI dengan dunia usaha dan industri (DUDI).

2) Target/Luaran

Target /luaran yg akan didapat (a) Terwujudnya model pembinaan kewirausahaan yang efektif dalam menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. (b) Lahirnya wirausaha baru di kalangan mahasiswa.

3) Khalayak Sasaran

Sasaran utama PkM berbasis kewirausahaan adalah para mahasiswa, khususnya mahasiswa yang memiliki komitmen tinggi untuk

mengembangkan kewirausahaan.

d. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian (PkM-BHP)

Program pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu dharma dari tri dharma perguruan tinggi yang tidak terpisahkan dari dharma lainnya, yaitu dharma pendidikan dan dharma penelitian. Tri dharma perguruan tinggi harus dilaksanakan oleh dosen secara sinergis, berkesinambungan dan satu kesatuan, sehingga menghasilkan aktivitas pendidikan, penelitian, dan PkM yang berkulaitas. Pelaksanaan bidang PkM masih dihadapkan kepada beberapa kendala, sehingga aktivitas PkM dari sivitas akademika UPI masih tergolong belum banyak dan kurang signifikan terutama program PkM dalam rangka pemecahan masalah-masalah pembangunan di masyarakat. Salah satu kendalanya adalah masih sedikitnya program PkM yang didasarkan kepada pemanfaatan hasil-hasil penelitian. Walaupun sebenarnya cukup banyak hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan dalam program PkM. Namun sampai saat ini dengan berbagai keterbatasan, hasil-hasil penelitian itu belum banyak dimanfaatkan untuk keperluan pemecahan masalah di masyarakat. Oleh karena itu melalui pengembangan skim PkM berbasis hasil penelitian diharapkan dapat mendorong para dosen/peneliti untuk menindaklanjuti/memanfaatkan hasil-hasil penelitiannya menjadi program PkM yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

1) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai:

- a) Mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian menjadi program pengabdian kepada masyarakat.
- b) Mendorong peningkatan kualitas dan kebermaknaan program pengabdian kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan peranan UPI dalam pemecahan masalah-masalah

yang ada di masyarakat.

2) Target/Luaran

Melalui PkM berbasis hasil penelitian diharapkan lahir model pengabdian kepada masyarakat dari pemanfaatan hasil-hasil penelitian di kalangan sivitas akademika UPI dan terdiseminasikan dalam bentuk artikel serta dipublikasikan pada jurnal/majalah nasional/internasional.

3) Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran PkM berbasis hasil penelitian meliputi masyarakat secara umum, kelompok masyarakat, dan institusi, baik di perdesaan maupun perkotaan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Bab ini akan membicarakan mengenai program dan jenis kegiatan, dan indikator kinerjanya. Penjelasan berkenaan kajian dalam bab ini dibuat dalam bentuk matrik berikut:

A. Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Pengabdian kepada masyarakat berbasis kepakaran bidang ilmu
2. Pengabdian kepada masyarakat melalui Pengembangan desa binaan berbasis kemitraan
3. Pengabdian kepada masyarakat berbasis kewirausahaan
4. Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian.

B. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan program pengabdian kepada masyarakat masing-masing. Kegiatan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Pengabdian kepada masyarakat berbasis kepakaran bidang ilmu
 - a. Pendampingan pemetaan pendirian kebutuhan sekolah
 - b. Pembuatan green desain kebutuhan bidang keahlian
 - c. Pembentukan dan pendampingan lembaga sertifikasi sebagai sarana untuk membantu kebutuhan dunia kerja sesuai dengan bidang keahlian
 - d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan model-model pembelajaran
2. Pengabdian kepada masyarakat melalui Pengembangan desa binaan berbasis kemitraan

- Mewujudkan dan mengisi program desa binaan berbasis kemitraan
 - Mengembangkan jaringan kerjasama dalam menguatkan program desa binaan dan membuka peluang kerja di daerah
 - Memberikan keterampilan fungsional yang berkelanjutan
 - Menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship
3. Pengabdian kepada masyarakat berbasis kewirausahaan
 - a. Kuliah kewirausahaan (KWU)
 - b. Inkubator bisnis,
 - c. Co-Op di UKM
 - d. Pendampingan Program Mahasiswa Wirausaha
 - e. Magang
 - f. Kuliah Kerja Usaha (KKU)
 4. Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian.
 - a. PkM berbasis hasil penelitian tentang karakter
 - b. PkM berbasis hasil penelitian tentang kebijakan pendidikan
 - c. PkM berbasis hasil penelitian tentang kualitas keprofesian

C. Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Indikator dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

No	Program PKM	Indikator Luaran	Target Jumlah Per Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengabdian kepada masyarakat berbasis kepakaran bidang ilmu	a. Kelompok warga sekolah					
		b. Kelompok masyarakat binaan					
		c. Jurnal nasional					
		d. Jurnal internasional					
		e. Prossiding					
		f. Makalah					
		g. Buku teks					
		h. Produk teknologi, modul, panduan					
2	Pengabdian kepada masyarakat	a. Desa binaan					
		b. Kelompok masyarakat binaan					

	melalui Pengembangan desa binaan berbasis kemitraan	c. Produk teknologi					
No	Program PkM	Indikator Luaran	Target Jumlah Per Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
		d. Jurnal internasional					
		e. Prossiding					
		f. Makalah					
		g. Modul					
		h. Panduan					
3	Pengabdian kepada masyarakat berbasis kewirausahaan	a. Mahasiswa memahami materi entrepreneurship					
		b. Mahasiswa memiliki pengalaman magang					
		c. Mahasiswa memiliki pengalaman cooperation academic education program	15	42	84	126	168
		d. Mahasiswa dapat membuat proposal PKMK					
		e. Mahasiswa memiliki keterampilan fungsional					
		f. Mahasiswa sudah merintis usaha					
		g. Jurnal nasional					
		h. Jurnal internasional					
		i. Prossiding					
		j. Pemakalah					
4	Pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian	a. Kelompok warga sekolah					
		b. Kelompok masyarakat binaan					
		c. Jurnal nasional					
		d. Jurnal internasional					
		e. Produk teknologi					
		f. Prossiding					
		g. Pemakalah					
		h. Buku teks					
		i. Panduan					

Upaya untuk memperjelas arah program pengabdian kepada masyarakat, perlu didasarkan pada isu global dan isu prioritas. Isu global yang dimaksud merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Sedangkan yang dimaksud isu prioritas yaitu pengetahuan sejauh mana masalah itu

penting dan merupakan masalah yang segera diatasi. Penjabaran tentang program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan pada isu global, permasalahan yang dipecahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Berdasarkan Isu Global

Isu Global	Isu Prioritas	Permasalahan Prioritas	Solusi Permasalahan	Program dan Jenis Kegiatan PkM	Kemitraan PT	Sumber Dana				
						PT	CSR	Pemda	Dikti	Sumber Lain
<ul style="list-style-type: none"> • Membangun pendidikan karakter bangsa dalam menghadapi tantangan MEA • Kebijakan pendidikan • Desentralisasi dan otonomi pendidikan • Mutu dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja • Profesi guru dalam menghadapi tantangan MEA 	<ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi dan otonomi pendidikan • Mutu dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja • Profesi guru dalam menghadapi tantangan MEA 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan lembaga pendidikan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja • Kurangnya kesesuaian bidang keahlian dengan tuntutan kebutuhan keahlian dunia kerja • Penghargaan level pendidikan yang kurang maksimal oleh pengguna tenaga kerja • Guru yang mengajar tidak sesuai bidang keahlian, latar belakang pendidikan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kebutuhan pendirian sekolah dan guru berdasarkan kebutuhan dunia kerja dalam memasuki era MEA • Pembuatan green desain kebutuhan bidang keahlian sesuai kebutuhan dunia kerja • Penyediaan lembaga sertifikasi sebagai sarana untuk membantu kebutuhan dunia kerja sesuai dengan bidang keahlian • Penguatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan model-model pembelajaran 	<p>Program: Pengabdian kepada masyarakat berbasis kepakaran bidang ilmu</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Pemetaan pendirian kebutuhan sekolah • Pembuatan green desain kebutuhan bidang keahlian • Pembentukan dan pendampingan lembaga sertifikasi sebagai sarana untuk membantu kebutuhan dunia kerja sesuai dengan bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah • Dinas pendidikan • Dinas kesehatan, • Dinas pariwisata, • Dinas koperasi, • Dinas perindustrian dan perdagangan, • Lembaga pelayanan publik, • Lembaga Swasta (CSR) • Usaha kecil dan menengah (UKM) 	V	V	V	V	V

Isu Global	Isu Prioritas	Permasalahan Prioritas	Solusi Permasalahan	Program dan Jenis Kegiatan PKM	Kemitraan PT	Sumber Dana				
						PT	CSR	Pemda	Dikti	Sumbar Lain
		mengajar secara konvensional.		keahlian • Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan model-model pembelajaran Pendekatan: • Pendidikan, • Pembinaan, • Pelatihan, • Pelayanan, dan • Kaji tindak. • Pendampingan						
	<ul style="list-style-type: none"> Membangun pendidikan karakter bangsa dalam menghadapi tantangan MEA Mutu dan relevansi pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan belum mampu membentuk karakter masyarakat yang taatib, kepatuhan terhadap pemerintah dan sistem politik Terdapatnya pengangguran yang berpendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk desa binaan menuju masyarakat yang taatib, kepatuhan terhadap pemerintah dan sistem politik Membentuk dan menguatkan jiwa entrepreneurship. 	Program: Pengabdian kepada masyarakat melalui Pengembangan desa binaan berbasis kemitraan Kegiatan: • Mewujudkan dan mengisi program desa binaan berbasis kemitraan						

Isu Global	Isu Prioritas	Permasalahan Prioritas	Solusi Permasalahan	Program dan Jenis Kegiatan PKM	Kemitraan PT	Sumber Dana				
						PT	CSR	Pemda	Dikti	Sumbar Lain
	dengan dunia kerja		<ul style="list-style-type: none"> Memberikan dan menguatkan keterampilan fungsional berbasis potensi local dan kebutuhan MEA Membuka peluang kerja masyarakat di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan kerjasama dalam menguatkan program desa binaan dan membuka peluang kerja di daerah Memberikan keterampilan fungsional yang berkelanjutan Menumbuh kembangkan jiwa entrepreneurship <p>Pendekatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Action research Pelatihan Penyuluhan Pendampingan Ujicoba model 						
	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa yang sudah tumbuh jiwa entrepreneurship belum mendapatkan fasilitas pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan dan memaksimalkan sarana pengembangan jiwa entrepreneurship bagi mahasiswa 	Program: Pengabdian kepada masyarakat berbasis kewirausahaan		V				

Isu Global	Isu Prioritas	Permasalahan Prioritas	Solusi Permasalahan	Program dan Jenis Kegiatan PkM	Kemitraan PT	Sumber Dana				
						PT	CSR	Pemda	Dikti	Sumbar Lain
	<ul style="list-style-type: none"> Mutu dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja 	<p>yang kurang maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya mahasiswa yang belum tumbuh jiwa entrepreneurship dan kemandirian Terdapatnya mahasiswa yang belum mampu membuka strategi, pendekatan peluang kerjasama dengan mitra 	<ul style="list-style-type: none"> Menumbuhkembangkan jiwa entrepreneurship dikalangan mahasiswa Memberikan pengalaman terkait strategi pendekatan peluang kerjasama dengan mitra Membuka kerjasama dengan mitra berbasis keahlian mahasiswa dan kebutuhan mitra usaha 	<p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kuliah kewirausahaan(KWU) Inkubator bisnis Co-Op di UKM Pendampingan PMW Magang Kuliah kerja usaha (KKU) <p>Pendekatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan Pelatihan Penyuluhan 						
	<ul style="list-style-type: none"> Membangun pendidikan karakter bangsa dalam menghadapi tantangan MEA 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan belum mampu membentuk karakter masyarakat yang taatib, kepatuhan terhadap pemerintah dan sistem politik 	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk desa binaan menuju masyarakat yang taatib, kepatuhan terhadap pemerintah dan sistem politik 	<p>Program: Pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian.</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PkM berbasis hasil penelitian tentang karakte 		V				

Isu Global	Isu Prioritas	Permasalahan Prioritas	Solusi Permasalahan	Program dan Jenis Kegiatan PkM	Kemitraan PT	Sumber Dana				
						PT	CSR	Pemda	Dikti	Sumbar Lain
	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pendidikan Profesi guru dalam menghadapi tantangan MEA 	<ul style="list-style-type: none"> Mahasiswa yang sudah tumbuh jiwa entrepreneurship belum mendapatkan fasilitas pengembangan yang kurang maksimal Terdapatnya mahasiswa yang belum tumbuh jiwa entrepreneurship dan kemandirian Guru yang mengajar tidak sesuai bidang keahlian, latar belakang pendidikan dan mengajar secara konvensional. 	<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan dan memaksimalkan sarana pengembangan jiwa entrepreneurship bagi mahasiswa Menumbuhkan kembangkan jiwa entrepreneurship dikalangan mahasiswa Penguatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan model-model pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> PkM berbasis hasil penelitian tentang kebijakan pendidikan PkM berbasis hasil penelitian tentang kualitas keprofesian guru <p>Pendekatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kaji tindak (action research), Pelatihan Penyuluhan dan Pemagangan 						

BAB V

POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN DISEMINASI

Bagian ini akan memberikan gambaran ringkas mengenai pola pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, pola pemantauan dan evaluasi, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

A. Pola Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan RENSTRA pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya sangat tergantung pada sumber dana institusi yang dapat diperoleh antara lain dari internal institusi, stakeholders, serta kerjasama dalam dan luar negeri.

Dana yang disediakan oleh institusi diperoleh dari berbagai sumber penghasilan universitas dalam bentuk Uang Tabungan Universitas (UTU). Dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, jumlah pengabdian kepada masyarakat internal UPI rata-rata berjumlah 27 judul per tahun dengan biaya 1.14 milyar rupiah per tahun. Pada tahun 2014, UPI menyediakan dana sebesar Rp. 950.000.000 untuk 17 judul pengabdian, tahun 2015 sebesar Rp. 1.250.000.000 untuk 25 judul pengabdian yang ditawarkan kepada para dosen melalui berbagai skim bentuk dan cara pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2016 sebesar Rp. 1.200.000.000 untuk 39 judul pengabdian yang meningkat rata-rata sebesar 36%. Berdasarkan antusias para dosen untuk meneliti, UPI telah berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan anggaran pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.

Dengan masuknya UPI sebagai perguruan tinggi dengan kategori Cluster Utama dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, tahun 2014, 2015, 2016 UPI memperoleh kesempatan untuk mengelola 14 judul sebesar Rp. 669.500.000 dari total anggaran DIPA DIKTI dikompetisikan secara nasional, maka diharapkan bantuan tersebut akan mendorong para dosen untuk lebih giat meneliti.

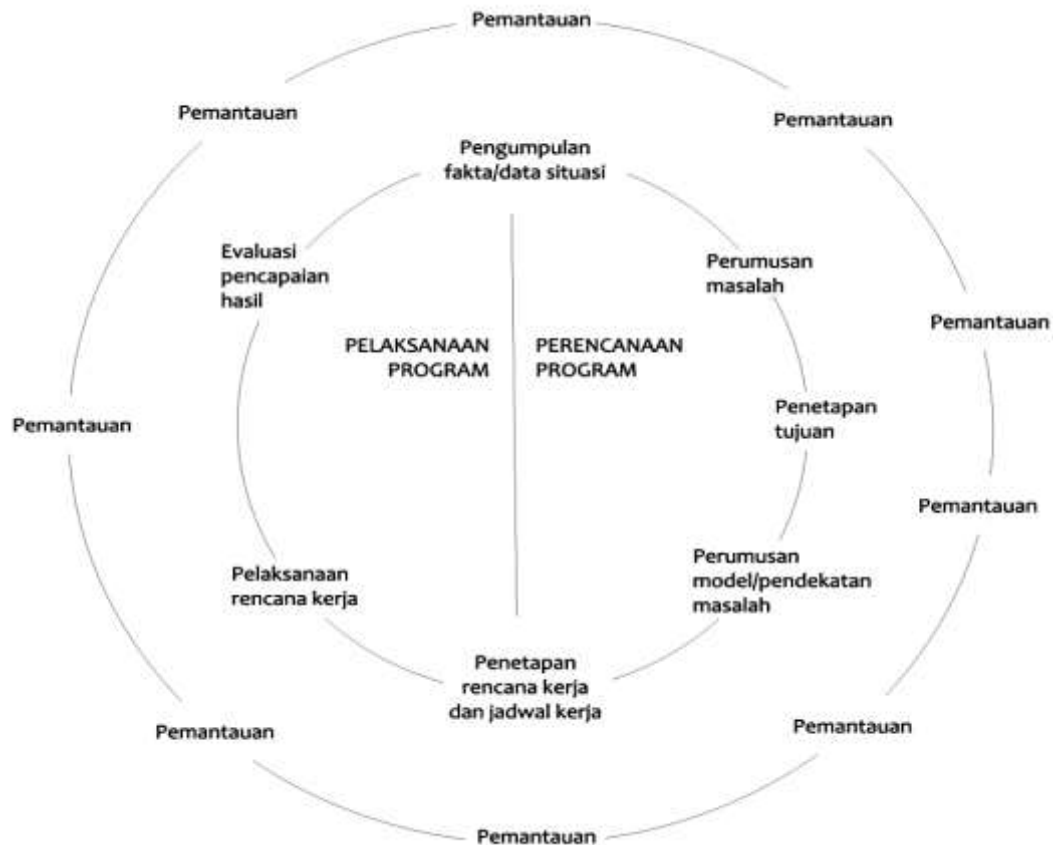
Sumber-sumber dana lainnya diharapkan diperoleh dari pemerintah pusat

lainnya adalah Direktorat Pendidikan Masyarakat, Kemenristek, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, BKKBN, Kementerian Pedesaan, CSR, Yayasan yang peduli pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dana dari pemerintah daerah berasal dari provinsi dan kabupaten/ kota yang telah mengadakan kerjasama. Pihak swasta dalam negeri yang mendanai pengabdian kepada masyarakat antara lain dana mandiri, perusahaan dan industri. Dana luar negeri yang ditawarkan melalui program USAD.

B. Pola Pemantauan

Pemantauan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya temuan-temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesuaian atau tidak.

Monitoring dan Evaluasi (ME) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang berbeda yaitu kata Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi dan bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut. Monitoring terhadap sebuah hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasi, hal tersebut seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 5.1
Lingkaran Pengembangan Program kepada Masyarakat
(diadaptasi dari Byrn, 1962)

Dari gambar diatas adanya kecenderungan bahwa evaluasi ditempatkan diakhir program, sedangkan pemantauan pada saat-saat program sedang berjalan. Beberapa ahli bahkan menyatakan bahwa lingkaran pengembangan program merupakan lingkaran evaluasi; sehingga pemantauan merupakan evaluasi yang dilakukan selama tahap pelaksanaan program, pada saat program itu sedang berlangsung. "Monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan" (Departemen Pendidikan Nasional: 2001). Monitoring juga lebih ditekankan untuk tujuan supervisi.

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan "Apa perbedaan yang dibuat". (William N Dunn : 2000).

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak, evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai. Evaluasi baru bisa dilakukan jika program telah berjalan dalam suatu periode, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dan dilaksanakan, misalnya disekolah, untuk satu catur wulan atau enam bulan atau satu tahun pelajaran.

1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Umpan balik dari sebuah program akan dipergunakan dalam perbaikan dan penyesuaian komponen-komponen yang tidak maksimal dalam pelaksanaan program dan bila memungkinkan perubahan skenario dapat dilakukan karena gagal dalam pelaksanaan program, monitoring tujuannya adalah seperti yang dikemukakan di atas oleh karena itu monitoring sangat diperlukan untuk keberhasilan sebuah program. Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, dengan mengetahui kebutuhan ini pelaksanaan program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan bisa berupa biaya, waktu, personel, dan alat.

Pelaksanaan program akan mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan, berapa lama waktu yang tersedia untuk kegiatan tersebut. Dengan demikian akan diketahui pula berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, serta alat apa yang harus disediakan untuk melaksanakan program tersebut. Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan. Secara lebih terperinci monitoring bertujuan untuk:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
- b. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
- c. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan;
- d. Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan;
- e. Mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan;
- f. Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program;
- g. Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.

2. Langkah-Langkah Monev

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti langkah langkah, pertama melakukan kegiatan perencanaan kegiatan, dimana langkah dan prosedur serta komponen isi yang akan dimonitoring dan dievaluasi disiapkan dengan baik, kedua pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasinya itu sendiri, dan ketiga melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan tertulis sebagai bahan untuk evaluasi dan balikan atas program-program yang sudah dilakukan.

a) Evaluasi terhadap rencana kegiatan

Evaluasi rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat menduduki posisi yang sangat penting agar apa yang dilapangan nantinya dapat sesuai dengan harapan pencapaian tujuan pengabdian kepada masyarakat. Secara berurutan model evaluasi adalah sebagai berikut :

- 1) Data situasi.
- 2) Perumusan masalah.
- 3) Rumusan tujuan kegiatan.
- 4) Rumusan model pemecahan masalah.
- 5) Rencana kerja dan jadwal kerja.

Langkah yang ditempuh dalam melaksanakan monev perencanaan yaitu pengusul program pengabdian kepada masyarakat mempresentasikan usulannya yang dinilai oleh tim (reviwer) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang terlebih dahulu pengusul mengirimkan usulannya secara online ke web LPPM.

b) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

Evaluasi selama proses pelaksanaan kegiatan biasanya dinamakan monev (monitoring evaluasi), dilakukan dengan cara mengamati dan mengukur apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana. Pengamatan umumnya dilakukan terhadap jalannya rencana kegiatan, jadwal kerja, serta penggunaan sumber daya dan sumber dana yang digunakan, serta ketepatan, efektifitas, dan efisiensi lebih banyak diterapkan pada pemantauan pelaksanaan kegiatan ini.

Berbagai metode dan alat pemantauan dapat digunakan pada fase ini. Sebagai contoh ialah : daftar hadir kegiatan, laporan (catatan) harian pelaksanaan, catatan (laporan sementara) pengeluaran keuangan, pengamatan langsung kelapangan terhadap berbagai kegiatan, laporan mingguan, laporan bulanan, peninjauan berkala atau mendadak. Dalam pelaksanaannya berbagai alat dan metode ini dilengkapi dengan kerangka yang berisikan variable (komponen) apa saja yang harus diamati, serta indicator pengamatannya. Selain itu monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh lembaga melalui tagihan laporan pendahuluan kegiatan, laporan keuangan, dan logbook. Selanjutnya lembaga menyiapkan tim reviwer untuk melakukan persentasi hasil pengabdian.

3. Evaluasi Akhir Program

Evaluasi ini dilakukan pada saat program berakhir, dan dimaksudkan untuk menilai apakah pencapaian tujuan program dengan tujuan yang telah direncanakan tepat sesuai dengan perencanaan. Selain itu, evaluasi akhir program juga dilakukan untuk meninjau kembali (review) semua hal yang sudah dilaksanakan selama pengembangan dan pelaksanaan program. Evaluasi akhir dimulai dengan mermuskan rancangan evaluasi, kemudian pelaksanaan evaluasi serta analisis dan pelaporannya. Semuanya analg dengan kegiatan yang menggunakan metode dan prinsip-prinsip ilmiah.

Pembahasan evaluasi akan dipusatkan pada beberapa hal penting dalam proses evaluasi, yaitu penyusunan model evaluasi, cara-cara pengamatan dan pengukuran, analisis, dan penyusunan laporan evaluasi.

a. Format Monev

Penyusunan format monev pengabdian kepada masyarakat tidak jauh berbeda dengan penyusunan format monev pada penelitian yang banyak ditulis dalam buku-buku metodologi penelitian yang tersedia dan tersebar luas. Pada dasarnya bagan (outline) format monev sama dengan bagan rancangan

evaluasi hanya saja ditambahkan laporan pelaksanaan monev, hasil monev, analisis interpretasi data, ditambahkan kesimpulan dan saran. Dengan demikian sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang dilakukannya monev
2. Tujuan dan kegunaan monev
3. Waktu dan tempat monev
4. Struktur organisasi tim monev
5. Metode monev
6. Pelaksanaan monev
7. Hasil monev
8. Analisis dan interpretasi data
9. Kesimpulan dan saran

b. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Mengacu dari hasil monitoring program pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan format monitoring yang mengkaver 9 komponen serta dilihat dari tingkat kebermanfaatan program maka akan terlihat, apakah program harus dilanjutkan atau dihentikan. Program pengabdian kepada masyarakat yang dilanjutkan adalah program-program yang berkesinambungan sesuai dengan kepakaran ilmu dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kewirausahaan yang sasarannya mahasiswa dilakukan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan budaya wirausaha dikalangan mahasiswa yang bekarakter.

BAB VI PENUTUP

Peluang Tindak Lanjut Program

Bertitik tolak dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang sangat berfariatif berkenaan dengan bentuk program yang tersebut di atas, maka perlu ada penegasan apakah program cukup dilakukan hanya 1 atau 2 atau 3 tahun dan oleh siapa yang menindak lanjuti program tersebut. Untuk menetapkan hal tersebut hasil Monev merupakan salah satu penentu tindak lanjut.

Di dalam tindak lanjut program pengabdian kepada masyarakat perlu adanya keterlibatan masyarakat sasaran dan pemerintah daerah setempat secara maksimal dalam upaya meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab program yang utuh. Dengan demikian program yang dilakukan oleh sivitas akademika merupakan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

REKTOR,

Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D
NIP. 195710021986031001

DAFTAR PUSTAKA

- Agenda Riset Nasional 2016-2019. (2016). Dewan Riset Nasional.
- Arya Baskoro (Associate Researcher). (2013). Peluang, Tantangan, dan Risiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi Asean. Tersedia: [Online] <http://crmsindonesia.org/knowledge/crms-articles/peluang-tantangan-dan-risiko-bagi-indonesia-dengan-adanya-masyarakat-ekonomi/>.
- Ruyadi, Yadi. Dkk. (2011). Membentuk Karakter Mahasiswa Calon Guru Melalui Penciptaan Kultur Akademik Ilmiah, Edukatif dan Religius. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rencana Induk Riset Nasional 2015-2045. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. 2014.
- Suryadi, Ace. (2014). Pendidikan Indonesia Menuju 2025. Outlook: Permasalahan Tantangan & Alternatif Kebijakan. Bandung: PT. Rosdakarya Offset.

